

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam paradigma baru, desa merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014) yang didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pembangunan infrastruktur merupakan bentuk dari kepedulian pemerintah, wujud dari model pembangunan tersebut adalah Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP). Pemerintah Indonesia melalui Ditjen Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum mencanangkan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan pengembangan infrastruktur permukiman di pedesaan melalui partisipasi masyarakat baik secara individu maupun kelompok

sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Infrastruktur pada dasarnya merupakan hasil pemerintah yang dibangun dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat (Sujani, 2019).

Dalam proses pembangunan sesuai dengan (Undang-Undang, Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa)mengacu pada dua pola pendekatan yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa” yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.(Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)telah mengubah dan mendorong masyarakat desa untuk agresif membangun desanya.

Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berwenang untuk mengatur kekuasaan Pemerintahan untuk kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarssa masyarakat, hak asal-usul, dan masalah adat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Adapun tugas-tugas-tugas Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah desa meliputi pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, hal ini sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014.

Pembangunan Infrastuktur di Desa Kiuola Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kemandirian dan perekonomian warga desa karena infrastruktur yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi baik bagi dunia usaha maupun bagi sosial

kemasyarakatan. Ketersediaan infrastruktur juga akan mempercepat pemerataan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat bukan keinginan masyarakat. Berikut Rencana Kerja Pemerintah Desa Kiuola Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara di tahun 2021 berdasarkan usulan masyarakat.

Tabel 1.1 Rencana Kerja Pemerintah Desa Kiuola Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021

NO	Daftarpembangunan	Volume	Lokasi	Sumber Dana	JumlahAnggaran
1.	Pembangunan Posyandu	1 Unit	Dusun II	APBD II	Rp.42.000.000,00
2.	Peningkatanjalanturunke kali	100 M	RT 05	APBDesa/ADD	Rp.18.950.500,00

Sumber: Kantor Desa Kiuola Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara

Berdasarkan data rencana kerja Pemerintah Desa Kiuola pada tabel di atas menunjukkan bahwa infrastruktur memiliki pengaruh yang cukup besar dan mendominasi RKPDesa di Desa Kiuola. Dimana infrastruktur seperti pembangunan jalan selalu mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan tiap tahun sehingga masyarakat Kiuola banyak mengeluh kondisi infrastruktur khususnya infrastruktur jalan yang saat ini dirasakan sangat mengganggu arusLalulintas jalan jika mereka pergi bekerja atau mengirimkan barang untuk dijual ke pasar. Kerusakan jalan menyebabkan ketidakefisien waktu dalam berkendara dan terganggunya masalah kehidupan masyarakat Kiuola.

Keberhasilan suatu pembangunan adalah suatu perencanaan atau salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhinya pembangunan infrastruktur berdasarkan apa yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah Desa Kiuola menetapkan dan sudah merealisasikan beberapa rencana kerja terkait pembangunan infrastruktur yang diusulkan oleh masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan dan kabupaten. Kembali pada tujuan pembangunan infrastruktur pedesaan yaitu apakah sudah menjawab kebutuhan masyarakat atau belum guna kelancaran kegiatan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kiuola Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kinerja Pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kiuola Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara 2021.

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja Pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kiuola Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, adapun yang menjadi manfaat penelitian ini , yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan tambahan bagi pengembangan dan penyempurna teori-teori dalam ilmu pengetahuan terkait dengan peran Pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang terkait dengan Kinerja Pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan peran Pemerintah Desa dalam pembangunan Infrastruktur di Desa Kiuola Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara.